

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerataan pendidikan dalam rangka penuntasan program wajib belajar bagi semua anak di Indonesia merupakan cita-cita luhur bangsa. Salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang merata dan berkualitas tanpa memandang status sosial, etnis, dan gender.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1-4 yang menegaskan:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.¹

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional. Pendidikan inklusi adalah sistem

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik baik tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, kondisi fisik, mental, dan sebagainya. Dalam Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), menyatakan bahwa pendidikan inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak dapat belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada pada mereka. Pendidikan inklusi juga diharapkan dapat menjawab kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak semua warga negara dalam bidang pendidikan.

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 1 bahwa:

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.²

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus yang berdiri sejak lama, menampung peserta didik dengan jenis kelainan yang sama sehingga muncullah SLB

² Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sementara pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Sekolah jenis ini menampung peserta didik berkebutuhan khusus dengan kategori lambat belajar, kesulitan belajar, cerdas istimewa dan berbakat istimewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP Negeri 275 Jakarta, alasan perlu adanya sekolah penyelenggaraan inklusi meskipun sudah tersedia Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah :

Agar anak-anak inklusi itu sejajar dengan anak-anak reguler, dalam arti sejajar disini mungkin bukan dalam intelektualnya, tetapi dari segi sosialnya, dari segi pergaulannya, dari segi berteman, karena anak-anak inklusi kebanyakan eksklusif atau menyendiri. Kedua aturan dari Pergub No.116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, bahwa setiap sekolah wajib menerima anak inklusi setiap kelasnya 2 orang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Psikolog dan surat keterangan dari sekolah asal (SD) atau surat referensi bahwa anak ini inklusi.³

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan bagi semua peserta didik reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelas yang sama. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi merupakan tempat untuk anak

³ Wawancara dengan wakasek bidang kesiswaan SMP Negeri 275 Jakarta Timur pada tanggal 30 Januari 2019.

berkebutuhan khusus mendapat perlakuan secara adil dari semua unsur yang terlibat ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Di dalam sekolah inklusi, peserta didik yang menyandang kebutuhan khusus mendapat segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusi tidak hanya sekedar menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler di dalam sekolah ataupun lingkungan belajar peserta didik normal lainnya, melainkan lebih memfasilitasi peserta didik agar lebih berkembang.

Guru dan peserta didik lainnya seyogyanya memperlakukan peserta didik berkebutuhan khusus secara baik sehingga muncul nilai-nilai keberagaman dalam sekolah. Nilai-nilai keberagaman tersebut dapat menjadi salah satu cara dalam mewujudkan pendidikan karakter.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ditjen GTK, Sri Renani Pantjastuti mengatakan hasil pendataan siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusif masih sedikit.

“Data yang kami terima hingga saat ini baru 3.240 siswa dari data pada Dapodik yang menyebut ada sebanyak 91.000 anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif”.⁴

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan layanan pada pendidikan inklusif di daerahnya. Terutama di era sistem zonasi sekarang ini, satu zona ditargetkan memiliki satu Sekolah Inklusi.

“Tidak harus kabupaten atau kota itu mendeklarasikan sebagai wilayah inklusi. Yang penting bisa dipastikan di setiap kecamatan ada sekolah inklusinya.” kata Sanusi di Jakarta.⁵

Dengan diselenggarakannya pendidikan khusus secara inklusi di sekolah umum, hal ini akan berpengaruh terhadap manajemen sekolah sehingga perlu adanya penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Sekolah yang mengimplementasikan ideologi pendidikan inklusi harus mengenal dan merespon setiap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap siswanya. Seperti mengakomodasi berbagai macam gaya belajar, serta menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa. Untuk itu tentunya harus melalui manajemen yang baik, penyusunan

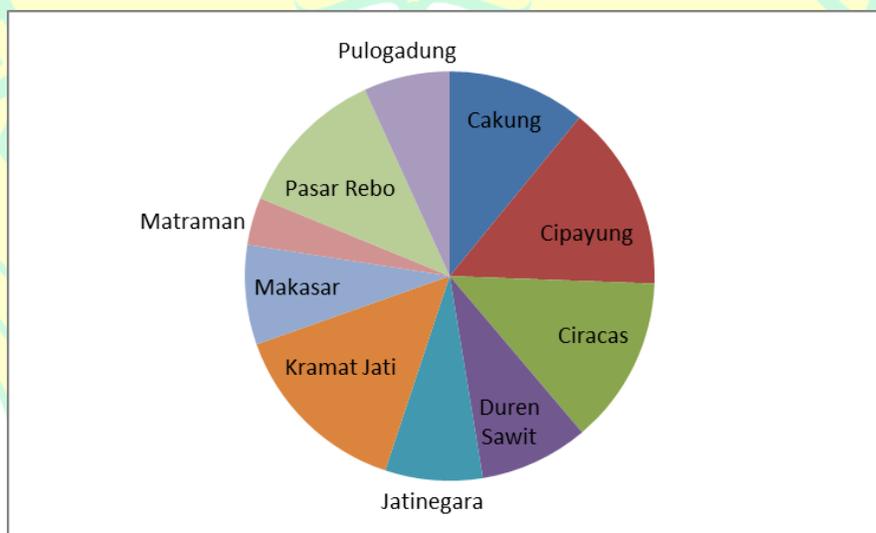
⁴ Kompas.com dengan judul Jumlah Data Masuk Siswa Disabilitas di Sekolah Inklusif Masih Sedikit, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/11/28/14021431/jumlah-data-masuk-siswa-disabilitas-di-sekolah-inklusif-masih-sedikit>. Diakses pada 1 Februari 2020 pukul 21.09.

⁵ Medcom.id dengan judul Satu Zona Ditargetkan Punya Satu Sekolah Inklusi, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxZ7OBk-satu-zona-ditargetkan-punya-satu-sekolah-inklusi>. Diakses pada 1 Februari 2020 pukul 21.32.

kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber daya dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.

Menurut Pergub No.116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki tiga TK/RA, SD/MI, dan satu SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sedangkan setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki tiga SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Kotamadya Jakarta Timur memiliki 95 sekolah menengah pertama negeri yang menerima peserta didik inklusi yang tersebar dalam 10 kecamatan, diantaranya Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulogadung.



1.1 Gambar Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Inklusi

di Jakarta Timur

Sumber : peneliti, 2021.

Dalam telaah peneliti yang bersumber pada portal PPBD DKI Jakarta, penerimaan terbanyak terdapat di kecamatan Cakung, sedangkan penerimaan paling sedikit ada pada kecamatan Matraman, dengan catatan kecamatan Matraman hanya memiliki dua sekolah negeri menengah pertama. Kendati demikian, tidak selalu kecamatan yang memiliki sekolah dengan jumlah banyak akan menerima peserta didik inklusi terbanyak. Hal ini terlihat dari data pada tabel dibawah, dimana kecamatan Duren Sawit memiliki jumlah sekolah negeri menengah pertama sebanyak 16, menerima peserta didik inklusi sejumlah 48 peserta didik. Sedangkan kecamatan Pasar Rebo memiliki sekolah negeri menengah pertama sebanyak 9 sekolah namun menerima peserta didik inklusi sejumlah 67 peserta didik.

Tabel 1.1 Penerimaan Peserta Didik Jalur Inklusi di Jakarta Timur

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik Inklusi
1	Cakung	12	61
2	Cipayung	13	82
3	Ciracas	11	74
4	Duren Sawit	16	48
5	Jatinegara	9	43
6	Kramat Jati	10	81
7	Makasar	7	44
8	Matraman	2	21
9	Pasar Rebo	9	67
10	Pulogadung	6	38
Jumlah Keseluruhan		95	559

Sumber : <https://ppdbdki.jakarta.go.id> dan <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>, diolah kembali oleh peneliti, 2021.

Berdasarkan data tersebut, jumlah sekolah menengah pertama negeri yang menerima peserta didik inklusi terbilang banyak namun belum mencukupi kebutuhan peserta didik inklusi secara keseluruhan karena minimnya guru pendamping khusus dan kurangnya fasilitas pendidikan bagi peserta didik inklusi.

Dalam melaksanakan pendidikan inklusi tentunya membutuhkan manajemen yang baik, demi tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Menurut Tery & Rue manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.⁶ Agar sumber daya manusia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu hasil yang maksimal. Maka diperlukan manajemen agar pengelolaannya dapat terencana sesuai dengan tujuan.

Sebagaimana diuraikan Fatah, bahwa manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, pengarahan dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁷ Perencanaan merupakan langkah awal dari

⁶ Shilphy A. Octavia, *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 16

⁷ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1-2

suatu pekerjaan tanpa ada perencanaan yang baik maka hasilnya pun tidak akan maksimal, pengorganisasian tidak kalah pentingnya dalam manajemen agar semua aspek yang terlibat dapat menjadi satu kesatuan yang padu, langkah terakhir yaitu proses mengarahkan dan mengendalikan agar rencana yang sudah dibuat tidak menyimpang keluar jalur.

Manajemen bertujuan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan administrasi, agar berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang dibuat bersama. Manajemen tidak akan berhasil apabila yang menjalankan tersebut hanya kepala sekolah tanpa didukung oleh *stakeholder* sekolah yang ada di bawahnya. Wakil kepala sekolah sebagai bagian dari struktur organisasi sekolah yang sehat dan efisien pada umumnya terdiri dari bagian kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan hubungan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak (*education for all*). Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu adanya manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis dan sentral dalam layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada diluar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik.

Fungsi dan tujuan akhir pembinaan peserta didik secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Menurut Knezevich dalam buku Imron, manajemen peserta didik atau *pupil personnel administration* merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan peserta didik di kelas ataupun di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di sekolah.⁹ Pengaturan terhadap peserta didik dilakukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga setiap peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Letak sekolah penyelenggara inklusi yang strategis akan memudahkan akses peserta didik dalam menempuh pendidikan, seperti halnya SMP Negeri 275 Jakarta Timur yang berada di area permukiman warga dan

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

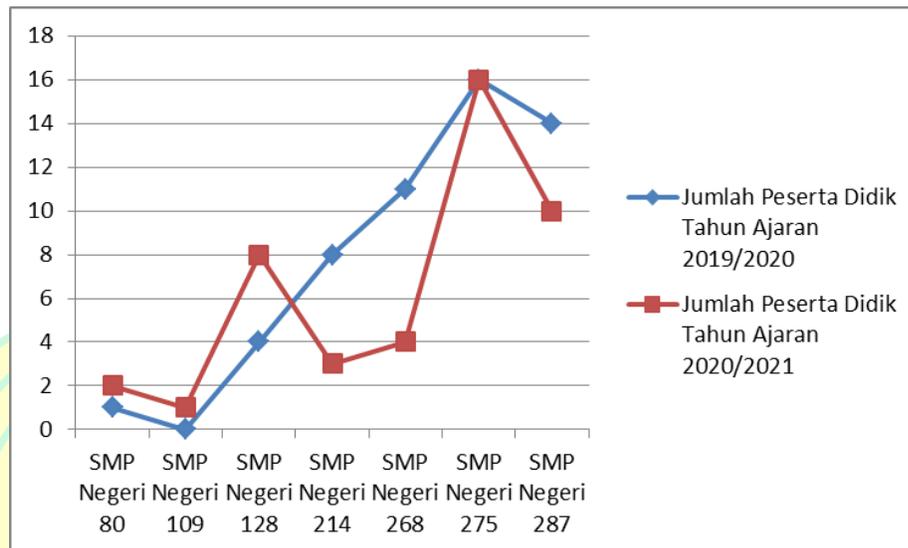
⁹ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Malang: Bumi Aksara, 2001), h. 6

transportasi yang mudah didapat. Didukung dengan dekatnya dengan jenjang sekolah sebelumnya (SD) dan jenjang sekolah setelahnya (SMA) membuat SMP Negeri 275 Jakarta Timur diminati peserta didik.

SMP Negeri 275 Jakarta Timur merupakan sekolah penyelenggaraan inklusi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Berdasarkan portal PPDB DKI Jakarta dua tahun ajar terakhir, dari beberapa sekolah negeri yang berdomisili di Kecamatan Makasar, SMP Negeri 275 Jakarta Timur konsisten dengan penerimaan peserta didik melalui jalur inklusi terbanyak. Berikut tabel yang diolah peneliti dengan melihat data yang tertera pada portal PPDB :

1.2 Tabel PPDB Jalur Inklusi di Kecamatan Makasar

No.	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik	
		Tahun Ajaran 2019/2020	Tahun Ajaran 2020/2021
1	SMP Negeri 80	1	2
2	SMP Negeri 109	0	1
3	SMP Negeri 128	4	8
4	SMP Negeri 214	8	3
5	SMP Negeri 268	11	4
6	SMP Negeri 275	16	16
7	SMP Negeri 287	14	10
Jumlah		54	44



1.2 Gambar Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Inklusi di Kecamatan Makasar

Sumber : <https://ppdbdki.jakarta.go.id> diolah kembali oleh peneliti, 2021.

Dalam data yang tertera pada tabel dan grafik terlihat bahwa sekolah-sekolah yang berdomisili di kecamatan Makasar menerima peserta didik melalui jalur inklusi namun terdapat perbedaan jumlah peserta didik yang diterima, pada tahun ajaran 2020/2021 beberapa sekolah terjadi penurunan dibanding tahun ajaran sebelumnya. SMP Negeri 275 menerima jumlah peserta didik inklusi terbanyak dan konsisten selama dua tahun ajar terakhir, sedangkan sekolah lain mengalami fluktuatif.

Sementara itu, pada tahun ajaran 2020/2021 secara keseluruhan berjumlah 881 peserta didik yang terdiri dari 844 peserta didik berkategori reguler dan 37 ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang dibagi menjadi 8

rombel setiap tingkatan kelas. Peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 275 Jakarta Timur meliputi, berkebutuhan/gangguan kesulitan belajar dan lambat belajar.

Peserta didik inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur diberi pembinaan setiap sepekan sekali, dengan tujuan peserta didik tersebut sejajar dengan peserta didik regular baik dalam hal akademik, non akademik, maupun kegiatan sosial. Pembinaan akademik peserta didik inklusi merupakan pemberian dorongan semangat dan evaluasi belajar peserta didik inklusi. Pembinaan non akademik merupakan eksplorasi minat dan bakat peserta didik inklusi yang dapat dituangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan pentas seni yang diadakan sekolah. Sedangkan pembinaan dalam hal sosial agar peserta didik inklusi lebih percaya diri dan tidak merasa malu ketika berinteraksi dengan teman lainnya, serta ditanamkan nilai-nilai moral lainnya seperti kebersihan, kedisiplinan, dan kejujuran.

Namun, terdapat permasalahan yaitu belum adanya guru pendamping khusus (GPK) di SMP Negeri 275 Jakarta Timur. Saat ini posisi guru pendamping khusus diisi sementara oleh guru BK . Hal ini senada dengan kondisi di beberapa sekolah dengan wilayah yang berbeda.

Berdasarkan penelitian oleh Achmad Hufron dalam jurnal yang berjudul Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Inklusi. SDN Pecarikan Prembun Kebumen terdapat 13 anak berkebutuhan khusus dengan

rincian 7 anak tunagrahita, 2 anak hiperaktif, 1 anak down syndrom, 2 anak tunarungu dan tunawicara, dan 1 anak penderita autis.

Dengan banyaknya anak yang berkebutuhan khusus pengelolaan kesiswaan dan kegiatan belajar mengajar agak kerepotan karena di sekolah tersebut belum ada guru pembimbing khusus. Perhatian dari pemerintah kabupaten juga belum optimal terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.¹⁰

Penelitian selanjutnya oleh Ana Kameloh Dian dan Desi Erawati dalam jurnal yang berjudul Manajemen Layanan Peserta Didik Inklusif di Kota Palangka Raya. Salah satu faktor yang menghambat proses manajemen layanan peserta didik inklusif di SMAN 4 Palangka, yaitu para guru di SMAN 4 Palangka Raya belum semuanya mengikuti penataran atau workshop tentang prosedur mengajar atau memberikan pelayanan kepada peserta didik inklusif, dan belum adanya guru pembimbing khusus untuk peserta didik inklusif.¹¹

Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dewi Puji Lestari dan Sujarwanto dalam jurnal yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama, terdapat permasalahan yang berbeda yaitu penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di SMP

¹⁰ Achmad Hufron, "*Manajemen Kesiswaan pada Sekolah Inklusi*", Jurnal Pendidikan Humaniora, Vol. 4 No. 02, Juni 2016, h.96

¹¹ Ana Kameloh Dian dan Desi Erawati, "*Manajemen Layanan Peserta Didik Inklusif di Kota Palangka Raya*", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 13 No. 02, Desember 2017, h. 213

Negeri 4 Sidoarjo melalui jalur inklusi dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen pihak sekolah tidak melibatkan tenaga ahli terkait seperti psikolog ataupun dokter.¹²

Berangkat dari temuan-temuan tersebut, maka sekolah penyelenggara inklusi khususnya dalam hal ini SMP Negeri 275 Jakarta Timur memerlukan manajemen peserta didik yang baik agar pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif. Menurut Tatang M. Amirin, dkk manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan yaitu: 1) perencanaan terhadap peserta didik, 2) pembinaan peserta didik, 3) evaluasi peserta didik, 4) mutasi peserta didik.

Manajemen peserta didik di sekolah inklusi harus siap untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan yang khusus tanpa terkecuali dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam pendidikan inklusif, segala macam keragaman itu dianggap sebagai kewajaran yang harus dihargai dan diakomodasi. Keragaman dalam hal "kebutuhan dan hambatan belajar" mendapat perhatian utama dalam pendidikan inklusif. Di samping itu, pendidikan inklusif lebih menekankan kepada mereka yang memiliki hambatan dan yang rentan untuk terpinggirkan.

Efektivitas keberhasilan pada pendidikan inklusi khususnya pada

¹² Fitria Dewi Puji Lestari dan Sujarwanto, "Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama", Jurnal Pendidikan Khusus, 2017, h. 11

peserta didik sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak termasuk keselarasan pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan penting dalam proses pembentukan dan pelaksanaan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah agar dapat memahami proses pelaksanaan yang berkaitan dengan penguatan sistem pembelajaran dan pengelolaan kelas disertai dengan fleksibilitas kurikulum yang memberikan pemahaman secara utuh tanpa harus ada pemisahan internal antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengangkat tema “Manajemen Peserta Didik Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 275 Jakarta Timur”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya lewat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Manajemen Peserta Didik Inklusi di Sekolah Menengah Pertama 275 Jakarta Timur?

Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :

1. Perencanaan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur
2. Pembinaan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur
3. Penawasan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian maka indikator dari rumusan masalah penelitian antara lain :

1. Bagaimana perencanaan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur?
2. Bagaimana pembinaan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur?
3. Bagaimana pengawasan Peserta Didik Inklusi di SMP Negeri 275 Jakarta Timur?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen peserta didik inklusi yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama 275 Jakarta Timur yang meliputi perencanaan, pembinaan, dan pengawasan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terkait dengan manajemen peserta didik inklusi untuk memperkaya referensi terutama yang terkait dengan penelitian tentang program penyelenggaraan sekolah inklusi.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, dan referensi dalam meningkatkan pemahaman manajemen peserta didik inklusi dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.

3. Bagi Civitas Akademika Manajemen Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian terhadap pelaksanaan manajemen peserta didik inklusi sebagai bagian dari manajemen sekolah.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang manajemen peserta didik inklusi agar penelitian selanjutnya semakin berkembang.